

**ANALISIS PENGARUH PERAN INVESTOR DAN UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPT) TERHADAP PERKEMBANGAN IKLIM USAHA
DI WILAYAH SURAKARTA**



Tesis

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Dalam Ilmu Manajemen

Oleh:

N a m a : BAMBANG SUDARMONO
N I M : P.1000 300 90
Program : Magister Manajemen

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Seminar Bank Dunia dengan Pemerintah Republik Indonesia selama dua hari yang berjudul “*Improving Indonesia Investment Climate, Reform Experiences from the Region*” tanggal 19 Nopember 2005, Wakil Presiden menekankan bahwa revitalisasi iklim usaha sangat penting dalam rangka peningkatan ekonomi Indonesia dari sekitar 6% menjadi 7% setahun, memperkecil pengangguran, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bank Dunia memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa iklim investasi Indonesia adalah yang terjelek di Asia Tenggara setelah negara Filipina. Negara yang memiliki iklim usaha paling baik adalah Malaysia, dan tentu Singapura. Menurut hasil *survey* Bank Dunia di 155 negara, maka peringkat Indonesia menempati urutan tertinggi dalam biaya mem-PHK karyawan, yaitu mencapai 145 gaji mingguan, lebih jelek daripada di Vietnam yang mencapai biaya PHK 98 gaji mingguan karyawan (Saidi, 2005: 1).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemajuan di bidang perekonomian Indonesia. Ekonom Bank Dunia, “Homi Karas”, menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir (tahun 2004) volume investasi di Indonesia mengalami kemajuan cukup signifikan, sehingga

dapat tumbuh *double digit*. Namun pemerintah wajib mereformasi berbagai sektor terkait dengan investasi secara konsisten. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa tahun 2005 begitu banyak kendala untuk meningkatkan investasi, misalnya subsidi dan utang yang harus dibayar. Harapan tahun 2006 akan jauh lebih baik dari sisi investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Dua urusan sektoral yang terkait dengan iklim investasi di Indonesia yang cukup banyak mendapat sorotan masyarakat adalah sektor perpajakan dan perburuhan. Sektor perpajakan dengan tarif 30% merupakan angka yang cukup layak dan dianggap tidak memberatkan bagi investor, karena negara Malaysia menerapkan pajak sebesar 28%. Berkaitan dengan urusan perpajakan ternyata cukup menyita waktu bagi pengusaha karena rata-rata ia harus menyisihkan waktu 560 jam setiap tahun untuk mengurus perpajakan (Saidi, 2005: 1). Sektor perburuhan dikarenakan biaya PHK yang terlalu tinggi, sehingga hal ini perlu diadakan reformasi.

Berkait dengan iklim investasi di Indonesia, pemerintah telah memiliki gagasan untuk membentuk tim perlindungan investasi dan hal ini tidak saja bergulir di tingkat nasional, namun di beberapa daerah termasuk Jawa Tengah wacana tersebut telah mengemuka, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Mardijanto seusai meresmikan Gedung Pusat Promosi dan Rancang Bangun (PPRB) atau *Java Design Centre* (JDC) tanggal 22 Pebruari 2006. Gagasan pembentukan tim

perlindungan investasi muncul pada saat ramai-ramai orang membicarakan hengkangnya perusahaan Sony dari Tangerang. Begitu sulit mengundang investor asing masuk, mengapa yang sudah berinvestasi di Indonesia justru keluar. Kenyataan ini cukup meresahkan. Bila hal ini atas pertimbangan situasi makro yang serba kurang menguntungkan barangkali dapat dimaklumi, namun apabila yang menjadi penyebab hengkangnya investor keluar itu masalah peraturan atau gangguan keamanan ? Tentunya hal ini sangat disayangkan.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Modal Asing, dalam Undang-Undang tersebut telah jelas diatur hal-hal yang berhubungan dengan penanaman modal asing di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Bab III tentang bidang usaha modal asing, Bab IV tentang tenaga kerja, Bab V tentang pemakaian tanah, Bab VI, tentang kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Namun dalam prakteknya permasalahan yang menjadi permasalahan bagi Investor antara lain buruknya pelayanan, masalah perijinan, kurangnya transparansi sehingga banyak perijinan yang berganda dan biaya sangat tinggi. Hal ini menyebabkan penyebab rendahnya iklim investasi (RED, 2004: 25-26).

Sementara itu dalam pengembangan iklim investasi di Jawa Tengah khususnya di Wilayah Surakarta, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian Otonomi

adalah kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah khususnya di wilayah se eks karesidenan Surakarta yang telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT), selanjutnya dalam penelitian ini disebut wilayah Surakarta yang terdiri dari 7 UPT yaitu Kabupaten Sragen, kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta.

Maksud dan tujuan didirikannya UPT tersebut adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang prima dalam pelayanan satu pintu. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun prinsip dari pelayanan prima ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menpen Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: *sederhana, jelas aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu*.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Peran Investor dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) terhadap Perkembangan Iklim Usaha di Wilayah Surakarta”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh Peran Investor dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) terhadap Perkembangan Iklim Usaha di Wilayah Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk: mengetahui pengaruh Peran Investor dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) terhadap Perkembangan Iklim Usaha di Wilayah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan Ilmu Manajemen Pemasaran dan Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di wilayah Surakarta berkaitan dengan peran investor dan peran Unit Pelayanan Terpadu (UPT) terhadap perkembangan Iklim Usaha di Wilayah Surakarta;
2. Memberikan masukan kepada para pelaksana pemerintah daerah khususnya Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan usaha di Wilayah Surakarta khususnya yang berkaitan dengan peran investor dan peran Unit Pelayanan Terpadu (UPT).